



**BAB II**

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**2.1 Capaian Kinerja Makro**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klungkung Tahun 2022 menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Mikro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,69	76,44	0,99
2	Angka Kemiskinan			
	- Persentase penduduk miskin (%)	5,64	6,07	7,62
	- Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	10,19	10,89	6,87
3	Angka Pengangguran	5,35	1,96	-63,36
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,23	3,12	3,35
5	Pendapatan Per Kapita	11287	11500	1,89
6	Ketimpangan Pendapatan (Gni Ratio)	0,346	0,351	1,45

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung 2022

**2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

**2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	111	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4054	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4054	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	540	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	577	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	422	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	108	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	156	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2676	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	626	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	16452	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8455	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1171	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	560	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1138	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	601	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	134	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	153	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	160	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	153	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	708	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	376	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	134	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	195	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sudah terakumulasi ke dalam data tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	149	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sudah terakumulasi ke dalam data tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	172	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	172	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	53	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	53	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	46	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	5	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Ibu hamil)	1980	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (ibu hamil)	42	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Peralinan)	1203	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	42	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Bayi baru lahir)	2388	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	42	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kesehatan Balita)	27198	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	124	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kesehatan anak usia dasar)	16116	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	266	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Skrining)	111845	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	454	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Hipertensi)	12500	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	18	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (DM)	9	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	137	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ)	25009	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	149	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC)	9	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV)	1000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	24	Dinas Kesehatan	
	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	422,39	Dinas PUPRKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	124.090,38	Dinas PUPRPKP	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	27,47	Dinas PUPRPKP	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	26.400,47	Dinas PUPRPKP	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPRPKP	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPRPKP	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	20890,48	Dinas PUPRPKP	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	57%	Dinas PUPRPKP	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	60%	Dinas PUPRPKP	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	32%	Dinas PUPRPKP	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPRPKP	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	Ada	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	5	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah kerja sama penyelenggara SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	57979	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak ada	Dinas PUPRPKP	tidak ada kegiatan pembangunan tangki septiktank ipal komunal
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	57979	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	326	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	326	Dinas PUPRPKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak ada	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	99	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	99	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	31	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,31	Dinas PUPRPKP	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	32	Dinas PUPRPKP	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	Dinas PUPRPKP	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	46	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	46	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	453804	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jembatan yg dibangun	0	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	19,38	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan yang dipelihara	0,636	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0,04	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRPKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	10	Dinas PUPRPKP	Kerjasama dengan LPSE
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	18	Dinas PUPRPKP	Kerjasama dengan LPSE
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	28	Dinas PUPRPKP	Aplikasi SIPJAKI
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Dinas PUPRPKP	Aplikasi SIPJAKI
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRPKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPMPPTSP	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPMPPTSP	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	DPMPPTSP	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPMPPTSP	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRPKP	
	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	775	Dinas PUPRPKP	Belum adanya pendataan terkait jumlah rumah Kabupaten Klungkung saat ini hanya memiliki peta luasan kawasan terdampaknya
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	3	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	3	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	3	Dinas PUPRPKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	17	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	44944	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	10,25	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	5,36	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah di kab/kota	57979	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	197	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah tidak layak huni	3538	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PUPRPKP	
		Rasio rumah dan KK	100	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah pembangunan baru	85	Dinas PUPRPKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	36	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	37332	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1027	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	57510	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	6	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	782	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	6	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	2	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	2	Dinas PUPRPKP	
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	105	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	59	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	65	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Satpol PP dan Damkar	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6	Satpol PP dan Damkar	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	10	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0,006	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,001	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,001	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	BPBD		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	51	Satpol PP dan Damkar	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	Satpol PP dan Damkar	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	Satpol PP dan Damkar	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	15	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	6	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	96	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	Satpol PP dan Damkar	
	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2674	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	59	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	149	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	149	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	130	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	60	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	60	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	146	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	40	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	130	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	7%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	39%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	93%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	33%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	11%	Dinas Ketenagakerjaan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase LPK yang terakreditasi	27%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	75%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah penganggur yang dilatih	40	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	73%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase penyerapan lulusan	0%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	159%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	38%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	2	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	8%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Data tingkat produktivitas total	-	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	30%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	174	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	54%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0,19	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah mogok kerja	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah penutupan perusahaan	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah perselisihan PHK	1	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Dinas Ketenagakerjaan	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	9	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	868	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	8	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	2	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	515	Dinas Ketenagakerjaan	yang di sahkan hanya berdasarkan Peraturan Perusahaan
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	697	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak ada sistem online
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100	Dinas Ketenagakerjaan	Di refocusing
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	868	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	15%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak ada LTSA



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	26	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	belum dilaksanakan evaluasi akibat refocusing anggaran
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mengacu pada Permendag No 57 tahun 2017
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada Daerah rawan pangan
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada daerah rentan rawan pangan
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	16	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	1	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/kota	1	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA :55,714 IKU : 85,104 ITH :29,139	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	9%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	53090	Disdukcapil	
		Penerbitan akta perceraian	988	Disdukcapil	
		Penerbitan akta kematian	13510	Disdukcapil	
		Penyajian data kependudukan	3	Disdukcapil	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas PMDPPKB	tidak ada desa tertinggal
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	102	Dinas PMDPPKB	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas PMDPPKB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23	Dinas PMDPPKB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17	Dinas PMDPPKB	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	54	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	344	Dinas PMDPPKB	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	30	Dinas PMDPPKB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	52	Dinas PMDPPKB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	153	Dinas PMDPPKB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	16	Dinas PMDPPKB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	3	Dinas PMDPPKB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	52	Dinas PMDPPKB	
	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	92%	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0%	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0%	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	39,69%	Dinas Perhubungan	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas komunikasi dan Informatika	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	97%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	42%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	15%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	16%	Dinas komunikasi dan Informatika	Belum ada yang memiliki sertifikat
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,15%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	94%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	6,1%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	15%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,004%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,5%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	tidak ada insentif
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	649	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1371	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	74399084 473	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	254	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	215	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	124	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Porsenijar
	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	3%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	3%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	4	Dinas Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	3	Dinas Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2	Dinas Kebudayaan	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5	Dinas Kebudayaan	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	6	Dinas Kebudayaan	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1	Dinas Kebudayaan	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya Kabupaten ke luar Kabupaten dengan dukungan data	-	Dinas Kebudayaan	Tidak ada cagar budaya yang diberikan izin keluar kabupaten( surat Pernyataan)
		Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Dinas Kebudayaan	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	6	Dinas Kebudayaan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	387 koleksi	Dinas Kebudayaan	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	38974	Dinas Kebudayaan	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Dinas Kebudayaan	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	7	Dinas Kebudayaan	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya	5	Dinas Kebudayaan	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Dinas Kebudayaan	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	11	Dinas Kebudayaan	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	8	Dinas Kebudayaan	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	22	Dinas Kebudayaan	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5	Dinas Kebudayaan	
	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,08%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	126	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,33%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aplikasi SIKN belum siap di gunakan
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	442	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak ada RTP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada RTP budidaya perikanan di klungkung yang luasnya di atas 2 hektar (Mengacu pada Permen KKP NO, 12/Men/2007 tetang perizinan Usaha Pembudidaya Ikan Luas lahan dibawah 2 hektar dikecualiakn dari izin
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	254.200 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	50	Dinas Pariwisata	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	29	Dinas Pariwisata	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	235	Dinas Pariwisata	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	410565	Dinas Pariwisata	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3	Dinas Pariwisata	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	2	Dinas Pariwisata	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	12%	Dinas Pariwisata	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	Dinas Pariwisata	
	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	3	Dinas Pertanian	
		Prasarana pertanian yang digunakan	3	Dinas Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada	Dinas Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas Pertanian	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0%	Dinas Pertanian	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0%	Dinas Pertanian	
	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	1	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Dinas Penanaman modal dan PTSP	Tidak ada ESDM di Kabupaten Klungkung
	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. - B. 100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	Kabupaten Klungkung TIDAK terdapat Pusat Perbelanjaan. Terkait dengan toko swalayan, bukti dukungnya yaitu data toko swalayan sampai tahun 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a. - b. - c. -	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	SIUP Bahan Berbahaya dikeluarkan oleh Provinsi. Terkait dengan pengawasan distribusi bahan berbahaya, bidang perdagangan telah melakukan kegiatan pengawasan distribusi bahan berbahaya tahun 2022. Bukti dukung terlampir
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	Penerbitan SKA dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA), yaitu di Provinsi dan Kabupaten Gianyar. Terkait dengan kegiatan ekspor, bidang perdagangan telah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha ekspor. Bukti dukung terlampir, yaitu data realisasi ekspor Kabupaten Klungkung
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	11,75%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	105	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	13,89 %	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	41,57%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	Untuk izin perkuasan kawasan industri merupakan kewenangan provinsi
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	20%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	2%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	-	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak ada penduduk transmigrasi
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak ada penduduk transmigrasi
		Jumlah satuan pemukiman yang dibangun	-	Dinas Ketenagakerjaan	Tidak ada penduduk transmigrasi



**2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	76,159 %	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100,596 %	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	96,163%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	81,132%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	Kesehatan	rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota	0,251%	Dinas Kesehatan	
		tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1,096%	Dinas PUPRPKP	Bukan Kewenangan Kabupaten
		Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	73,972%	Dinas PUPRPKP	Bukan Kewenangan Kabupaten
		Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	57,884%	Dinas PUPRPKP	
		Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	68,718%	Dinas PUPRPKP	
		Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,191%	Dinas PUPRPKP	
		Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas PUPRPKP	
		Mengukur tingkat kemantapan jalan	89,075%	Dinas PUPRPKP	
		Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	Dinas PUPRPKP	
		Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUPRPKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas PUPRPKP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas PUPRPKP	Tidak ada program relokasi
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	52,293%	Dinas PUPRPKP	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,102%	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1,771%	Dinas PUPRPKP	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,092	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satpol PP dan Damkar	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	Satpol PP dan Damkar	
	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	5,572%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KETENAGAKERJAAN	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,34%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	48,148%	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	80,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12,351%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,675%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKA :20,949 IKU :34,467 ITH :6,381	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	56,997%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	99,399%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	88,02 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Kepemilikan akta kelahiran	96,897%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	13,514%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	Dinas PMDPPKB	Tidak ada desa tertinggal
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	Dinas PMDPPKB	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,2%	Dinas PMDPPKB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	51,932%	Dinas PMDPPKB	
	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,61%	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,16%	Dinas Perhubungan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	96,939%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93,542%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	86,614%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	10,467%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-42,453 %	DPMPSTP	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	0%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	44%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40,541 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	40,541 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	77,519%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	KEBUDAYAAN	Terlestariannya Cagar Budaya	33,333%	Dinas Budpora	
	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	53,48%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,26%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Belum mendapatkan penilaian



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,75%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20,83	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	589,039	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10492,4 92%	Dinas Pariwisata	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	554,63%	Dinas Pariwisata	
		Tingkat Hunian Akomodasi	51,391%	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	35,588%	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,623%	Dinas Pariwisata	
	PERTANIAN	Persentase tingkat produktivitas pertanian	621,925 %	Dinas Pertanian	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	55,351%	Dinas Pertanian	
	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	DPMPSTP	Tidak ada ESDM di kab klungkung
	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kinerja realisasi pupuk	94,301%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	13,889%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	6,026%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	20%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan	



**2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	35,941	BPKPD	
		Rasio PAD	26,905	BPKPD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,183	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	-	BPKPD	
		Opini Laporan Keuangan	10 Kali WTP	BPKPD	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ( PENGADAAN)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	Bagian PBJ	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	161,015%	Bagian PBJ	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	48,747%	Bagian PBJ	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ( KEPEGAWAIAN )	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	315,939%	BPKSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,675%	BPKSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,23%	BPKSDM	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0%	BPKPD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0%	BPKPD	



No	FungsiPenunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Assets Management	Ya	BPKPD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0%	BPKPD	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	0%	BPKPD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	0%	BPKPD	

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilities manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung sebagaimana telah diubah dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Perubahan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap (%)
1	2	3	4	5	6
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	82,00	71,81	87,57
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,80	72,55	101,04
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,80	6,07	73,54
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	2,20	-0,23	-10,45
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	61,90	63,84	103,13
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	83,60	81,85	97,91
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	21,00	18,74	110,76
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DLHP)	64,00	66,57	104,02
Capaian Rata-Rata Sasaran Kinerja					83,44

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 8 sasaran dengan 8 indikator kinerja dan capaian rata-rata kinerja sasaran adalah 80,93%. Dari 8 sasaran tersebut terdapat 4sasaran dengan capaian diatas 100%, dan 3 sasaran dengan capaian dibawah 100 persen, dan 1 sasaran dengan capaian kurang dari nol/minus. Pada tahun 2022, rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar 83,44%.

Analisa atas capaian indikator – indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

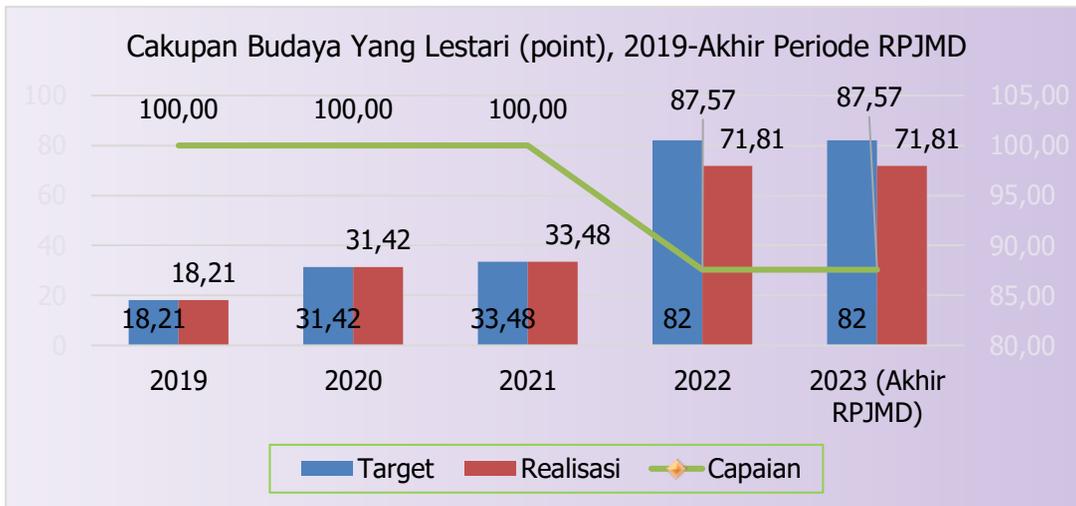


### Sasaran 1 Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah

Bukti perkembangan kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari warisan budaya tak benda dan benda yang terus dapat dilestarikan sehingga dapat lestari sampai ke generasi berikutnya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk terus melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Klungkung baik yang bersifat kebendaan maupun yang tidak bersifat kebendaan. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air perlu dilestarikan keberadaannya. Hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat Kabupaten Klungkung merupakan bentuk warisan budaya tak benda. Mengetahui, menyadari dan mengenali adalah cara yang bisa dilakukan sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tak benda tersebut.

Dalam menunjukkan komitmen melestarikan kebudayaan Daerah di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Cakupan Budaya Yang Lestari. Cakupan Budaya Yang Lestari dihitung dengan membandingkan antara Budaya Yang Lestari (benda dan takbenda) dengan Budaya Daerah Yang Terdata di Kabupaten Klungkung (benda dan tak benda). Budaya tak benda meliputi : sekaa teruna, subak sawah, subak abian, tradisi dan budaya takbenda lain di Kabupaten Klungkung, sementara Budaya Benda mencakup Cagar Budaya, Situs Budaya dan berbagai budaya kebendaan yang lain. Dalam melakukan pengumpulan data, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan bahwa budaya benda yang lestari adalah budaya benda yang telah ditetapkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sementara Budaya tak benda yang lestari adalah budaya tak benda yang dalam kurun waktu satu tahun setidaknya pernah tampil satu kali dalam acara pagelaran/pameran baik di Kabupaten Klungkung maupun di Provinsi Bali.

Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2022 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas KebudayaanKab. Klungkung, 2023

Gambar Cakupan Budaya Yang Lestari, 2019-2023 dan Capaian RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 sebesar 87,57 persen. Dimana target Cakupan Budaya Yang Lestari ditargetkan sebesar 82 persen dan terealisasi sebesar 71,81. Jika dilihat dari trend,Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkungmengalami peningkatan yang signifikan, dimana sebelumnya Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2021hanya sebesar 33,48 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2022 adalah 87,57 persen.

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung menjadi suatu titik ungukit pembangunan di bidang kebudayaan di Klungkung. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung tidak terlepas dari sejarah Klungkung sebagai pusat Kerajaan Bali dan pusat perkembangan kebesaran kebudayaan Bali masa lalu. Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung dilaksanakan dalam rangka perlindungan, penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali.Penetapan kawasan tersebut sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) termuat dalam dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029.Tujuan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung adalah untuk mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang mengintegrasikan upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat edukasi, konservasi, rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (*Green Sustainable Development*) dan berbasis IT (*Smart Integrated Development*).



Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai berikut:

1. Mendukung pembangunan Pusat Kebudayaan Bali berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat terdampak, pengelolaan dampak-dampak social pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dan juga menjaga keamanan tetap kondusif.
2. Penyusunan kajian dan dokumentasi warisan budaya tak benda berupa : Ritus Mejaga-Jaga, Dewa Masraman, Mabayang-Bayang, dan Sanghyang Grodog. Selain penyusun kajian dan dokumentasi ritus juga dilakukan penyusunan kajian kerajinan berupa : pembuatan Genta, Uyah Kusamba, Cepuk Rang-Rang, dan Gong Tihingan.
3. Pelaksanaan AKSiku (Atraksi Melestarikan Seni Kebudayaan Kabupaten Klungkung) dilaksanakan berupa kegiatan pameran keris, konservasi lontar, menulis dan membaca aksara bali, kajian WBTB, dan kegiatan edukatif kultural.
4. Penyebarluasan budaya melalui media online seperti sosialisasi cagar budaya dan sosialisasi terkait kegiatan – kegiatan pelestarian budaya benda di Museum Semarajaya.
5. Penyelenggaraan bulan Bahasa Bali merupakan suatu kebijakan yang sangat mendukung lestari dan berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Klungkung. Penyelenggaraan bulan bahasa bali yang menysasar siswa di sekolah-sekolah membantu pelestarian bahasa bali mulai dari generasi muda.
6. Penelusuran, pendataan, pencatatan dan penetapan budaya-budaya asli Kabupaten Klungkung baik berupa budaya benda maupun budaya tak benda dilakukan secara intensif. Penetapan enam kebudayaan Kabupaten Klungkung sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan RI yaitu : kain tenun cepuk (2021), barong nong-nong kling (2021), dewa masraman (2021), caru mejaga-jaga (2021) , wayang klasik kamasan (2020) dan tari baris jangkang Nusa Penida (2020).
7. Penelusuran budaya benda yang tersebar ke luar daerah, ditandai dengan diterimanya benda pusaka berupa mata tombak dan keris peninggalan Perang Puputan Klungkung 1908 dari Ketua Yayasan Westerlaken, Belanja di Puri Agung Klungkung tepat di hari peringatan Puputan Klungkung ke-112 dan HUT Kota Semarapura ke-28 pada tanggal 28 April 2020.

Dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan



Daerah pada tahun 2022 didukung oleh faktor internal dan eksternal diantaranya:

1. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung menjadi titik ungkit perkembangan kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.
2. Penetapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, membuat dukungan untuk melestarikan kebudayaan daerah terus menguat. Penggunaan Bahasa Bali juga terus ditingkatkan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta. Hal tersebut mendorong penggunaan bahasa bali dan busana adat bali di seluruh lapisan masyarakat.
3. Adanya dukungan yang kuat dari lembaga adat di Kabupaten Klungkung dalam terus melestarikan budaya tak benda berupa tradisi dan berbagai seni di Kabupaten Klungkung.
4. Penduduk Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa suku dan agama membantu adanya akulturasi budaya yang melahirkan budaya baru.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali membawa dampak lain seperti: tumbuhnya penduduk pendatang yang menyebabkan permasalahan social dan ekonomi lain, berkurangnya lahan pertanian produktif yang menyebabkan berkurangnya lahan pekerjaan bagi petani, hilangnya kawasan hijau yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta permasalahan lain.
2. Pengembangan budaya di masa pandemi covid-19 mengalami banyak hambatan. Hal tersebut terjadi karena pengembangan budaya pada umumnya dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan berbasis komunitas. Akulturasi budaya sangat cepat terwujud dengan pertemuan orang, sementara pertemuan orang adalah hal yang dihindari saat pandemi covid-19. Penyebarluasan budaya melalui media online dapat terlaksana dengan baik, namun pewarisan budaya mengalami hambatan mengingat pewarisan budaya memerlukan interaksi antara yang mewariskan dan yang menerima. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah pewarisan budaya menari tradisional yang dalam upaya pelestariannya membutuhkan interaksi



langsung dan dengan kontak fisik.

3. Belum intensifnya pendataan, pengkajian, dan pendaftaran kekayaan budaya secara valid.
4. Kerjasama pengembangan budaya dengan para pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan budaya sering mengalami hambatan disebabkan belum tercetusnya komitmen bersama pengelolaan budaya berupa cagar budaya.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi  
Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah  
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan Budaya yang lestari (%)	82,00	100	0,82	71,81	97,73	0,73	-0,10	Tidak Efisien
<b>Jumlah</b>	<b>82,00</b>	<b>100</b>	<b>0,82</b>	<b>71,81</b>	<b>97,73</b>	<b>0,73</b>	<b>-0,10</b>	<b>Tidak Efisien</b>

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah adalah sebesar -0,10 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah dicapai dengan Tidak Efisien. Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2022 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah



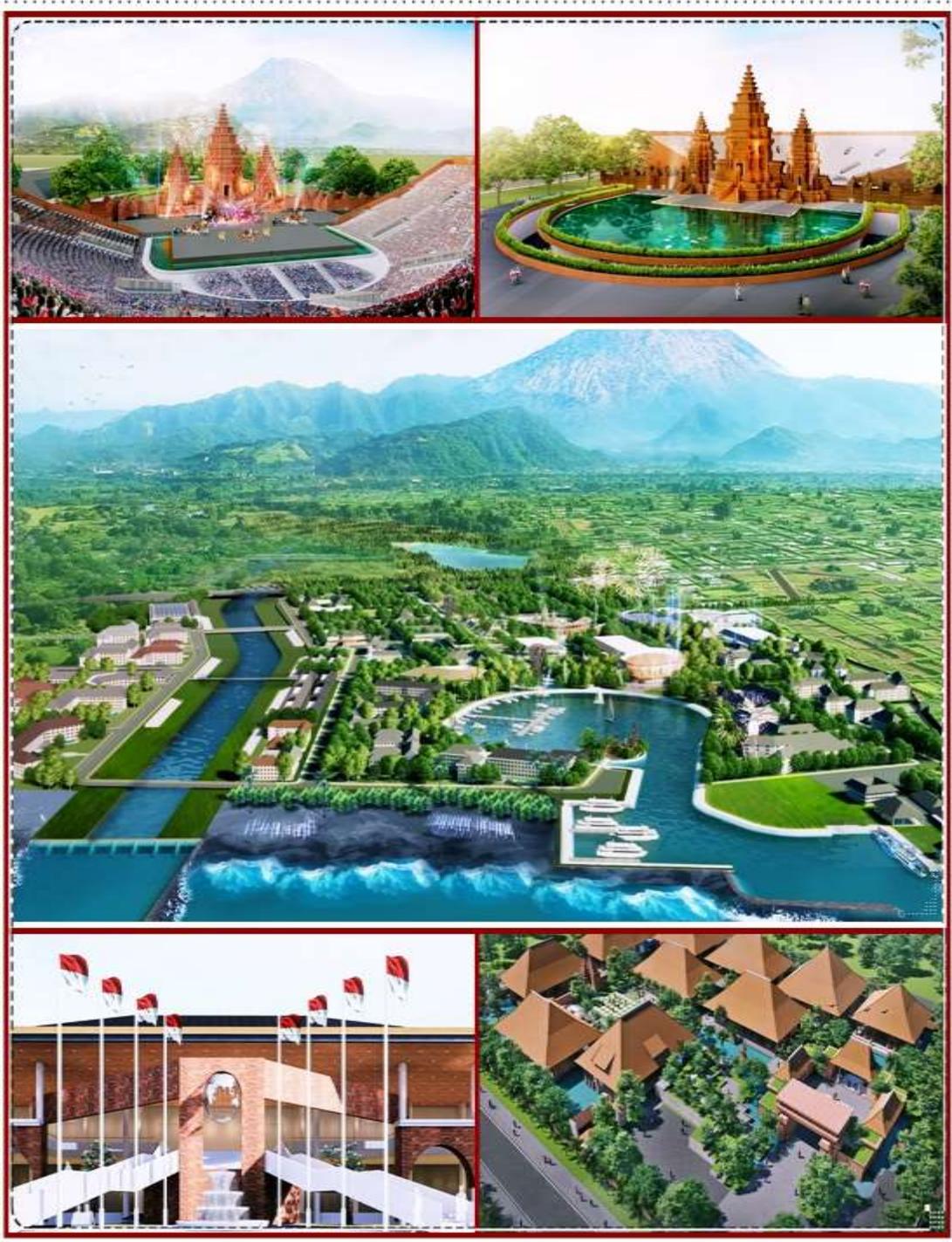
## Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.851.664.750	3.717.160.948	134.503.802	96,51
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	706.619.184	703.863.184	2.756.000	99,61
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.754.981.754	35.946.119.404	808.862.350	97,80
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	18.620.000	18.620.000	-	100,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	41.975.192	41.762.192	213.000	99,49
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	774.279.276	764.441.426	9.837.850	98,73
<b>Jumlah</b>	<b>42.148.140.156</b>	<b>41.191.967.154</b>	<b>956.173.002</b>	<b>97,73</b>

Sumber : *fms.klungkungkab.id*, 7 Pebruari 2023.

Pada tahun 2022, Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah didukung dengan 6 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 42.148.140.156 dan terealisasi sebesar Rp. 41.191.967.154 dan sisa anggaran sebesar Rp. 956.173.002 atau terealisasi sebesar 97,73 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung.

### DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Masterplan Pusat Kebudayaan Bali  
Sumber: Website DPUPRKP Provinsi Bali



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta pada Pameran Keris dan Pusaka Khas Klungkung serangkaian perayaan Hari Tumpek Landep , 9 April 2022  
Sumber: beritabalionline.com



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, pada sebuah kegiatan AKSIKU

**Sasaran 2**  
**Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu bangsa, karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya. Pembangunan Manusia dengan peta jalan yang

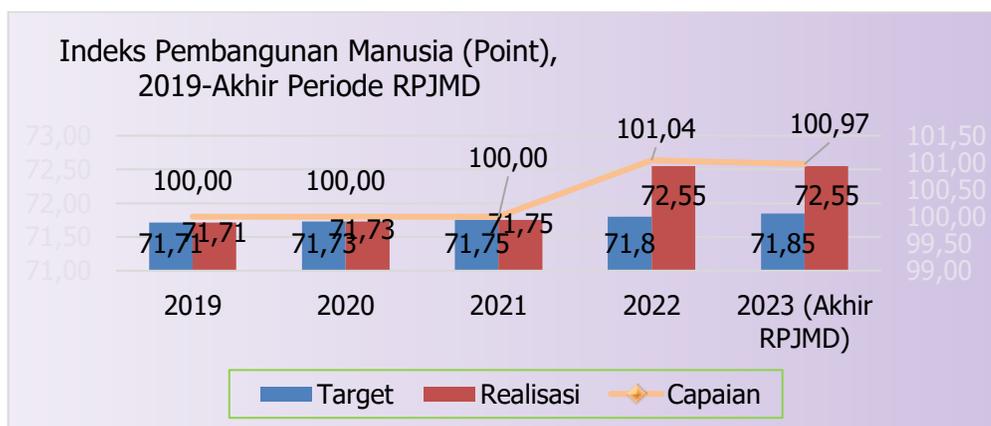


jelas dan terukur dan dilakukan secara massif, sangat diperlukan guna menjawab tantangan pembangunan dan memastikan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting hingga tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan standardisasi nilai minimum dan maksimum dari masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.



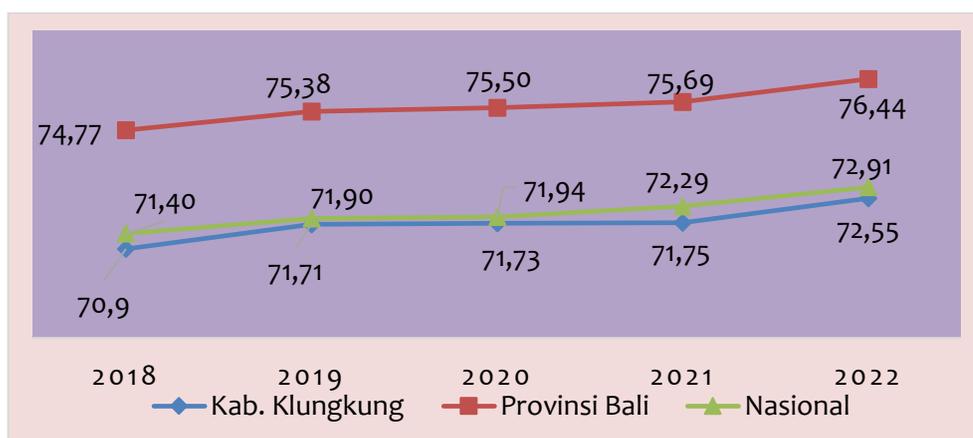
Capaian sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Indeks Pembangunan Manusia, 2019-2023 dan Capaian RPJMD

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 71,8 point. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada website bps.baliprov.go.id, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 adalah sebesar 72,55 point atau tercapai sebesar 101,04 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Perubahan Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa 2018-2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung telah tercapai sebesar 100,97 persen. Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung menunjukkan tren meningkat, untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



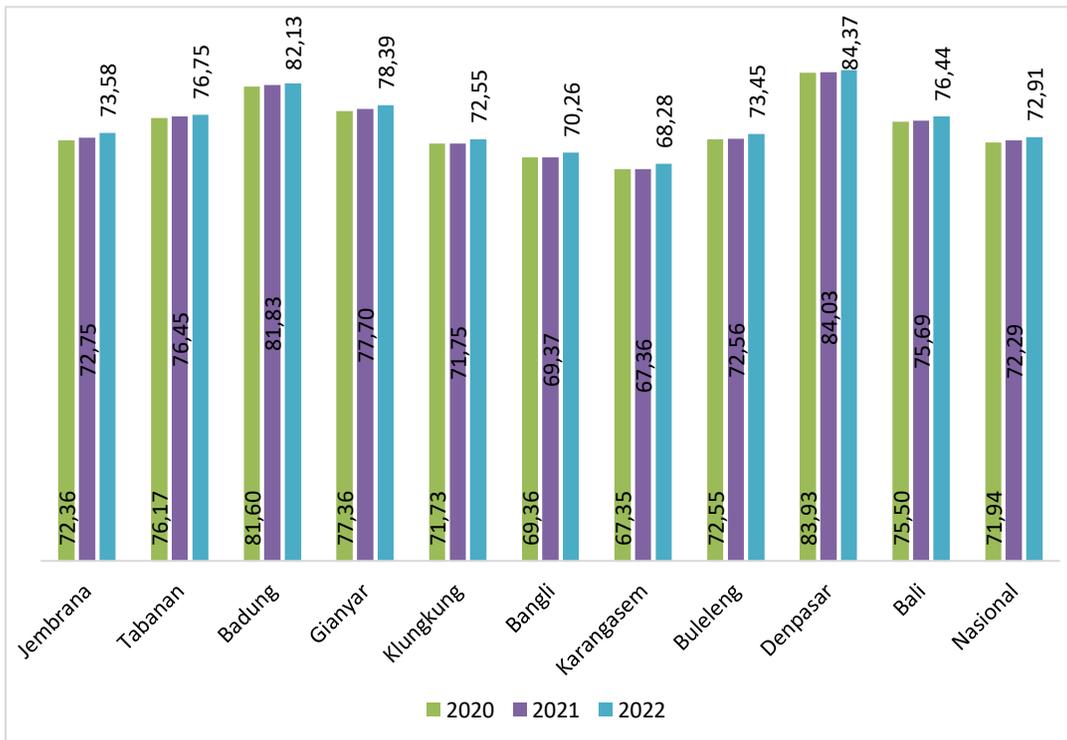
Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kab. Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional, 2018-2022



Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada dibawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional. Hal tersebut menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan pembangunan manusianya.

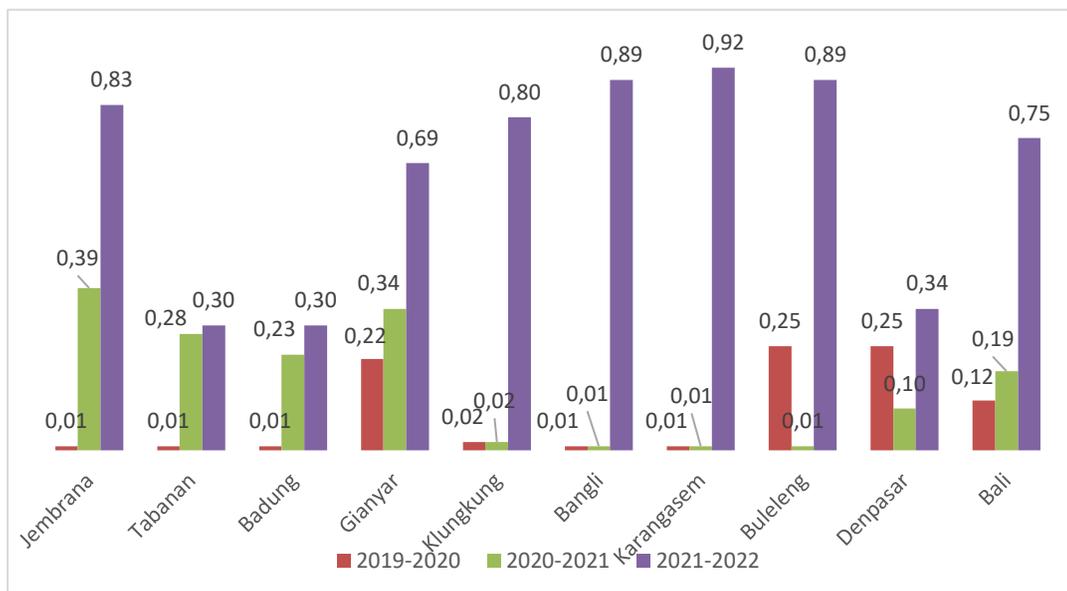
Untuk memotret kemajuan pembangunan manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah kecepatan serta status pencapaian pembangunan manusia tersebut. Dari 9 Kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang berada di urutan ke 7 diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali dari sisi status pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional sebagai berikut:



Sumber : [bps.baliprov.go.id](https://bps.baliprov.go.id), 1 Desember 2022

Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional, 2020-2022

Untuk melihat pencapaian pembangunan manusia, tidak hanya dilihat dari status pencapaiannya, namun juga dilihat dari pertumbuhan pembangunan manusia itu sendiri. Untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali dari tahun 2021 ke tahun 2022

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa daerah dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada periode tahun 2021 ke tahun 2022 adalah Kota Denpasar dengan pertumbuhan di atas 0,92 poin. Namun demikian, IPM Pemerintah Kabupaten Klungkung juga mencatatkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,80 poin dan menempati peringkat kelima pertumbuhan IPM dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Pertumbuhan IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2022 bahkan melebihi pertumbuhan IPM Provinsi Bali.

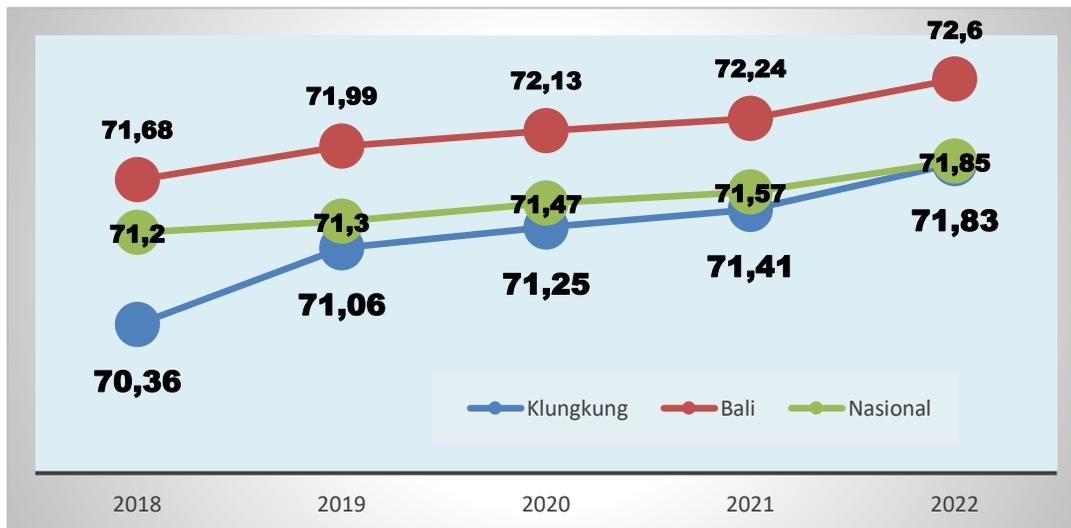
Untuk mengetahui secara rinci mengenai fokus utama yang berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori diharapkan mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.



Pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung khususnya bidang kesehatan dapat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung disajikan pada grafik sebagai berikut.

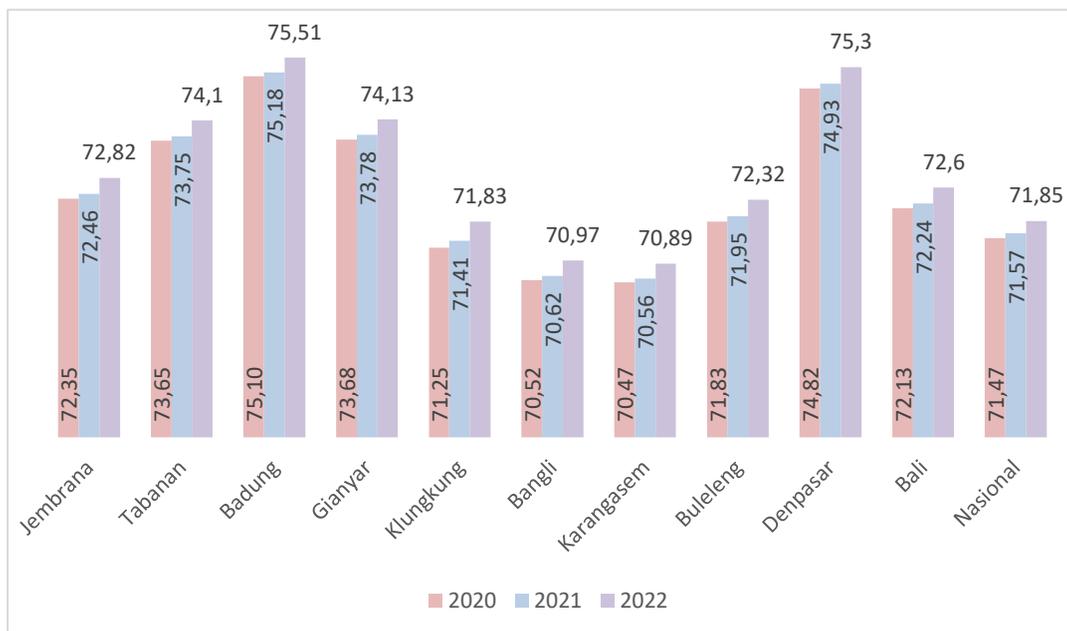


Sumber : *bps.baliprov.go.id*, 1 Desember 2022

Gambar Angka Harapan Hidup (Tahun), 2018-2022

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung sebesar 70,36 tahun dan meningkat menjadi 71,83 tahun pada tahun 2022, hanya berselisih 0,02 tahun dari angka nasional yang bernilai 71,85 tahun. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pembangunan di sisi kesehatan.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang disajikan dengan gambar di bawah ini:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (tahun), 2020-2022

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa selama periode tahun 2020-2022, peringkat Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tidak berubah. Kabupaten Klungkung masih berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali, dimana peringkat tertinggi diraih Kabupaten Badung yang mencapai 75,51 tahun pada tahun 2022 dan terendah ada di Kabupaten Karangasem yang baru mencapai 70,89 tahun. Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 mencapai 71,83 tahun berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Bali yang sebesar 72,6 tahun.

Dalam usaha meningkatkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Metode Promotif dan Preventif merupakan metode terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah manapun, namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Klungkung belum dapat sepenuhnya ditingkatkan disebabkan rentang kendali dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, kedepannya metode promotif dan preventif akan lebih ditingkatkan lagi.
2. Pengawasan terhadap kualitas kesehatan lingkungan merupakan suatu pekerjaan besar yang jika berhasil dituntaskan akan sangat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Dampak pembangunan yang tidak terarah memperburuk kualitas kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan lingkungan seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan



pembangunan infrastruktur.

3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam tahun 2022, strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pertumbuhan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif.

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengubah strategi pembangunan bidang kesehatan dengan lebih menguatkan upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif. Metode promotif seperti sosialisasi bahasa asap rokok, sosialisasi bahaya narkoba dan promosi kesehatan lain dilakukan melalui berbagai media sosialisasi. Selain itu, sosialisasi protokol kesehatan berupa rajin mencuci tangan, penggunaan masker, pembatasan jarak fisik serta berbagai gaya hidup sehat juga semakin banyak dilakukan. Kegiatan preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, screening penyakit tidak menular, vaksinasi bagi penyakit-penyakit tertentu, serta pelayanan terpadu bagi ibu dan anak juga terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui jajarannya di bidang kesehatan menyadari bahwa langkah-langkah promotif dan preventif lebih efektif dan efisien dibandingkan langkah-langkah kuratif (penyembuhan).

2. Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Protokol kesehatan standar dalam masa pandemi covid-19 menjadi suatu keharusan bagi seluruh fasilitas layanan kesehatan. Untuk itu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung disiapkan untuk menangani pasien dengan protokol kesehatan yang memadai sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 serta memberikan kesembuhan bagi pasien yang terinfeksi.

3. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Peningkatan pelayanan gawat darurat dikemas dalam sebuah aksi yang dikenal dengan "KRIS 118". KRIS 118 menjadi layanan Kesehatan dan



kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Klungkung baik dalam pelayanan rujukan dan kegawat daruratan terpadu pra hospital dalam rangka mencegah kematian dan kecacatan merupakan tujuan utama layanan AGD KRIS 118. AGD KRIS 118 merupakan unit pelayanan yang dibentuk untuk mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat dan membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan dan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Puskesmas yang mewilayahinya. Diadakannya AGD KRIS 118 dilandasi aspek *time management* sebagai implementasi *time saving is life and limb saving* yang mengandung unsur kecepatan atau *quick respons* dan ketepatan berupa mutu pelayanan yang sesuai standar. Unsur kecepatan dipenuhi oleh sistem transportasi dan komunikasi, sedangkan unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan gawat darurat meliputi *basic life suport* (BLS) dan *advance life suport* (ALS) sesuai masalah yang dihadapi. Dalam kondisi kedaruratan sehari-hari/umum/kebidanan, AGD KRIS 118 bertugas memberikan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan rumah tangga, pelayanan kebidanan emergensi, rujukan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan untuk kegiatan sosial keagamaan. AGD KRIS 118 juga menerima panggilan masyarakat untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi kelompok masyarakat resiko tinggi yang membutuhkan seperti para lansia yang tidak mampu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi kedaruratan khusus/bencana AGD KRIS 118 secara langsung bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah komando BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan. Akses yang cepat dan mudah pada pelayanan AGD KRIS 118 adalah kunci keberhasilan atas manfaat pelayanan. Dalam masa pandemi covid-19, tim reaksi cepat AGD KRIS 118 merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien yang terinfeksi covid-19. Penjemputan pasien di rumah dilakukan untuk memastikan pasien dtangani dengan penanganan yang memadai di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya di masa pandemi, tim AGD KRIS menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

4. Pelayanan Kesehatan *Door to Door* atau DORKESMAS. Merupakan program aksi yang melayani pasien langsung di rumah pasien.
5. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit



Peningkatan pelayanan di rumah sakit berupa penyediaan sarana dan prasarana terkait penanggulangan virus covid-19, peningkatan pelayanan lain dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesehatan dengan cara kuratif. Selain itu, seluruh komponen didalam Rumah Sakit Umum Daerah juga aktif mempromosikan protokol kesehatan serta gaya hidup sehat kepada masyarakat.

#### 6. Pemenuhan *Universal Health Coverage*

Pemenuhan jaminan kesehatan secara universal juga merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan sebagai berikut:

1. Bencana covid-19 secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut mengarah menjadi sebuah kebiasaan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Pada tahun 2022, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat dibanding bidang lainnya. Hal tersebut menjadi suatu pengungkit yang baik untuk peningkatan layanan kesehatan yang berdampak pada peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung.
3. Bantuan perbekalan kesehatan yang diterima dari masyarakat baik komunitas maupun sektor privat dalam masa pandemi covid-19 menunjukkan tingginya toleransi masyarakat pada upaya penanggulangan bencana akibat virus tersebut. Kerjasama dengan masyarakat tersebut menjadi suatu faktor pendukung dalam upaya peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Klungkung.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 untuk inovasi GEBRAK (Gerakan Bersama Remaja Anti Rokok).
2. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 untuk inovasi DORKESMAS (Datangi Obati Rawat Kesehatan Masyarakat)
3. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk inovasi KRIS (Kring Sehat) Inovasi pelayanan kesehatan dengan ambulance yang mendatangi masyarakat

- langsung ke tempat tinggal dan melakukan penanganan awal di tempat tinggal pasien.
4. Penghargaan PASTIKA AWYA PARIWARA, dianugerahkan kepada 10 daerah di Indonesia yang telah memiliki kebijakan/peraturan dan implementasi tentang larangan iklan rokok luar gedung
  5. Puskesmas dengan pelayanan ramah anak terbaik 2018
  6. Kabupaten dengan Universal Health Coverage diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  7. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik untuk Rumah Sakit Umum Daerah
  8. Kabupaten dengan capaian pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Fase II Tahun 2018 tertinggi di Provinsi Bali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Bupati Klungkung meninjau fasilitas kesehatan-  
okezone news



Bersih-Bersih Puntung Rokok di Pantai



Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk

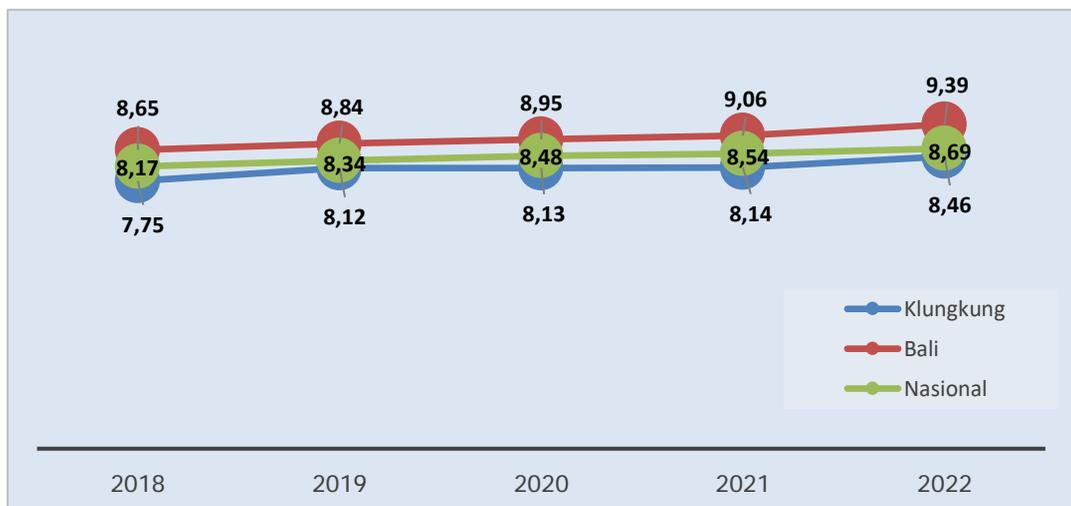


Bulan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular



b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Di bawah ini disajikan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2018 sampai dengan 2022.

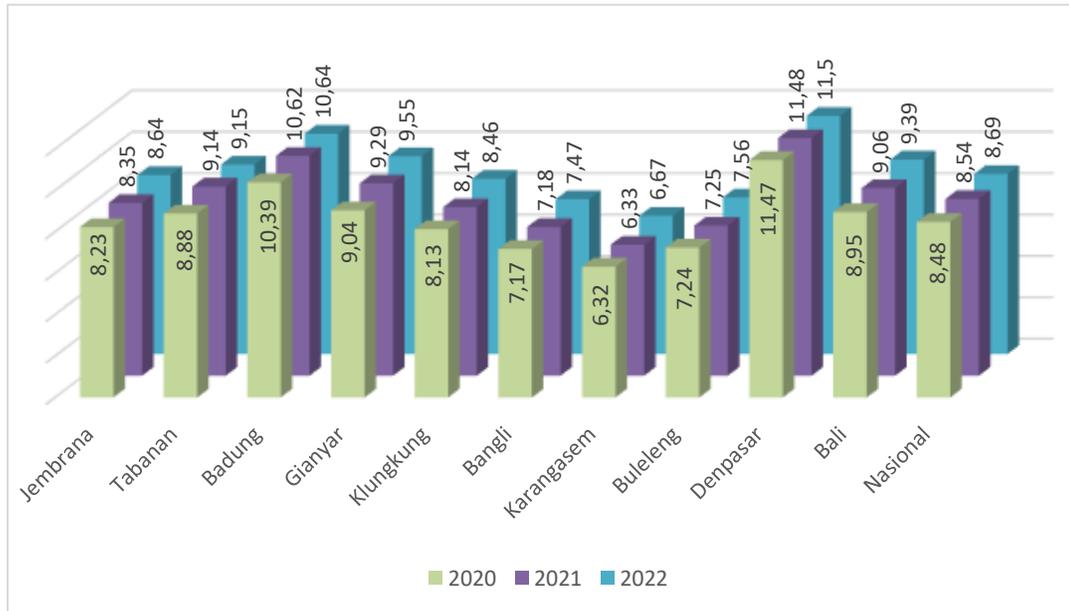


Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab.Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,32 mencapai angka 8,46 tahun, dengan tren meningkat sejak tahun 2018. Namun Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar di bawah menyajikan perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2020-2022

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung berada di urutan 6 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi berada di Kota Denpasar dengan capaian 11,5 tahun dan terendah di Kabupaten Karangasem dengan capaian 6,67 tahun.

Dalam mewujudkan kinerja peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Setelah pandemi covid-19 kegiatan belajar mengajar secara bertahap kembali dilakukan secara tatap muka. Hal tersebut menuntut kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tetap mengutamakan protocol kesehatan. Beberapa sekolah yang memiliki rombongan belajar yang mendekati kapasitas ruang mengalami kesulitan dalam menerapkan protocol kesehatan. Penerapan jarak social juga sulit dilakukan bagi anak-anak yang senang berinteraksi secara langsung dengan temannya.
2. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas daratan dan kepulauan mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan yang dipicu oleh terbatasnya akses di beberapa sekolah di kepulauan. Keterbatasan akses tersebut juga mencakup akses terhadap internet, perangkat dan transportasi.
3. Kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan merupakan fokus baru yang belum tergarap, hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas lulusan sekolah. Dalam suasana pandemi covid-19, pendanaan untuk bidang pendidikan



berbanding terbalik dengan bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat ditunda mengalami refocusing termasuk pemeliharaan gedung sekolah, penambahan bahan ajar, fasilitasi penegerian TK, pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan terhadap masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal dan berbagai kegiatan lain mendapat pengurangan anggaran.

4. Kemiskinan menjadi salah satu sumber penyebab rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, mempengaruhi penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan dan membatasi harapan anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kemiskinan juga menjadi masalah baru dalam pendidikan di masa pandemi covid-19 karena membatasi akses terhadap sarana dan prasarana belajar daring.

5. Perubahan fokus pemenuhan kebutuhan selama pandemi.

Banyak sektor terpengaruh pandemi covid-19. Perekonomian tumbuh negatif. Tingkat pengangguran meningkat tajam. Hal tersebut menurunkan pendapatan yang berdampak pada berbagai sisi kehidupan, terutama tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga. Fokus utama pemenuhan kebutuhan beralih ke kebutuhan dasar kehidupan seperti pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi tersisihkan. Hal tersebut juga mempengaruhi sisi lain dari dunia pendidikan seperti : penutupan usaha-usaha pendidikan seperti kursus, les dan privat yang biasanya menjadi pendidikan tambahan selain di sekolah bagi siswa. Pada tahun 2022, usaha-usaha pada sector pendidikan mulai buka seperti sebelum pandemic. Hal tersebut juga menjadi suatu factor pendorong bagi keluarga-keluarga untuk meningkatkan pemenuhan pendidikan bagi keluarga.

6. Isu perdagangan anak dengan tindakan penculikan menjadi suatu kendala saat pendidikan dilakukan secara tatap muka. Terdapat kecemasan siswa, orang tua dan pengajar dalam

Kabupaten Klungkung merupakan satu diantara kabupaten lain di Indonesia yang harus menyiapkan strategi-strategi baru dalam tetap mewujudkan kualitas pendidikan yang memadai pasca situasi pandemi covid-19. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan strategi sebagai berikut:



1. Mengalihkan proses pembelajaran dari online ke proses pembelajaran tatap muka. Kendala pelaksanaan pendidikan secara online seperti: kurangnya akses siswa/orang tua siswa pada teknologi baik dari sisi keterampilan penggunaan teknologi, perangkat maupun internet; ketersediaan waktu orang tua dalam mendampingi anak belajar secara daring; kemampuan anak dalam memahami materi pelajaran melalui metode daring; kurangnya penguatan atau pendalaman yang dapat dilakukan dalam pembelajaran secara daring; pengawasan terhadap anak-anak dalam mengakses internet dan berbagai kendala lain sudah menyebabkan kemunduran kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk itu setelah pandemic covid-19 mereda, pembelajaran dikembalikan ke pembelajaran tatap muka.
2. Meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam menjaga siswa dalam waktu pembelajaran maupun diluar waktu pembelajaran di sekolah.
3. Salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan usia dini, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan konsep 1 desa 1 taman kanak-kanak negeri. Dengan menyediakan 1 taman kanak-kanak negeri yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk anak-anak prasekolah.
4. Penyediaan angkutan siswa gratis bagi siswa SMP merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menanggulangi beberapa permasalahan sekaligus yaitu: penggunaan kendaraan bermotor oleh anak sekolah yang belum cukup umur, meringankan biaya transportasi bagi siswa yang kurang mampu, memudahkan pengawasan keberangkatan dan pulang sekolah, melatih anak-anak dalam disiplin waktu, membudayakan penggunaan kendaraan umum dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta memberdayakan angkutan umum yang mulai sepi peminat.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan antar siswa dalam bidang olahraga maupun seni.
6. Menerapkan protokol kesehatan di sekolah.
7. Penerimaan siswa baru dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan sistem penempatan siswa menggunakan rayon atau wilayah terdekat dengan tempat tinggal siswa. Hal tersebut selain menjamin kedekatan pelayanan dengan siswa juga untuk mengurangi kesenjangan sebaran siswa di sekolah



yang bertempat di desa dan di perkotaan. Isu bahwa sekolah di perkotaan lebih berkualitas daripada sekolah di pedesaan telah menyebabkan sebaran siswa di sekolah yang berlokasi di wilayah pedesaan menjadi jarang/sedikit dan di sekolah perkotaan justru terlampau padat/berlebihan.

8. Meningkatkan minat dan budaya baca yang dilakukan dengan semakin meningkatkan tingkat kunjungan ke perpustakaan dan menggalakkan rencana aksi **GEMA ARCA**. Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar Membaca) adalah suatu rencana aksi yang bertujuan untuk mengkampanyekan gemar membaca di kalangan masyarakat. Rencana aksi Gema Arca direalisasikan dengan penyediaan perpustakaan daerah, perpustakaan di desa-desa, perpustakaan di sekolah-sekolah dan juga penyediaan perpustakaan dalam bentuk mobil keliling yang menyediakan layanan perpustakaan di tempat-tempat keramaian di Kabupaten Klungkung. Dalam masa pandemi, penyediaan perpustakaan keliling tidak dilakukan. Layanan perpustakaan lebih banyak diarahkan ke perpustakaan digital. Perpustakaan digital dilakukan dengan layanan bacaan dan peminjaman buku secara online melalui [www.sipuspa.klungkungkab.go.id](http://www.sipuspa.klungkungkab.go.id) Perpustakaan digital juga melayani pendaftaran anggota secara online.
9. Launching gedung perpustakaan daerah yang baru dengan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan pembaca.
10. Memperkuat pendidikan luar sekolah dengan mengadakan pendidikan non formal bagi penduduk yang putus sekolah formal.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di situasi pandemi, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendapat dukungan sebagai berikut:

1. Kemudahan belajar daring adalah adanya akses yang luas terhadap berbagai bahan ajar yang mudah diperoleh dalam jaringan internet. Hal tersebut meningkatkan keragaman pengajaran yang diterima siswa, meskipun di sisi lain sebagian siswa tidak dapat mengaksesnya.
2. Pengawasan siswa beralih ke pengawasan tingkat keluarga yang lebih mendekatkan interaksi siswa dan orang tua. Hal tersebut menumbuhkan pemahaman bahwa pendidikan terhadap anak tidak hanya diberikan dan ditentukan oleh sekolah namun lebih banyak pada tingkat keluarga.
3. Sektor privat dan masyarakat juga memberikan dukungan seperti: penyelenggaraan lomba-lomba oleh unit bisnis seperti lomba mewarnai, lomba menyanyi dan sebagainya, menjadi suatu faktor pendukung

peningkatan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan acara pentas bintang pendidikan di akhir tahun 2022 serangkaian HUT PGRI merupakan salah satu bentuk dukungan seluruh komponen dunia pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung.

Dalam pencapaian sasaran bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Klungkung meraih prestasi diantaranya:

1. Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Cabang Olahraga Bulutangkis Tunggal Putra
2. Juara I Nasional Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Cabang Lomba Cerpen
3. Juara III Nasional Pemilihan Guru SD Berprestasi

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Bupati Klungkung mengunjungi lomba mewarnai



Bupati Klungkung membuka program pendidikan guru penggerak Angkatan III



Bupati Klungkung bersama siswa di layanan angkutan siswa gratis



Bupati Klungkung meresmikan TK Negeri di Kecamatan Banjarangkan



c. Pengeluaran Per Kapita

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index*(ppp) atau sering disebut pengeluaran per kapita. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung mencanangkan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat yang ditunjukkan pada gambar berikut:



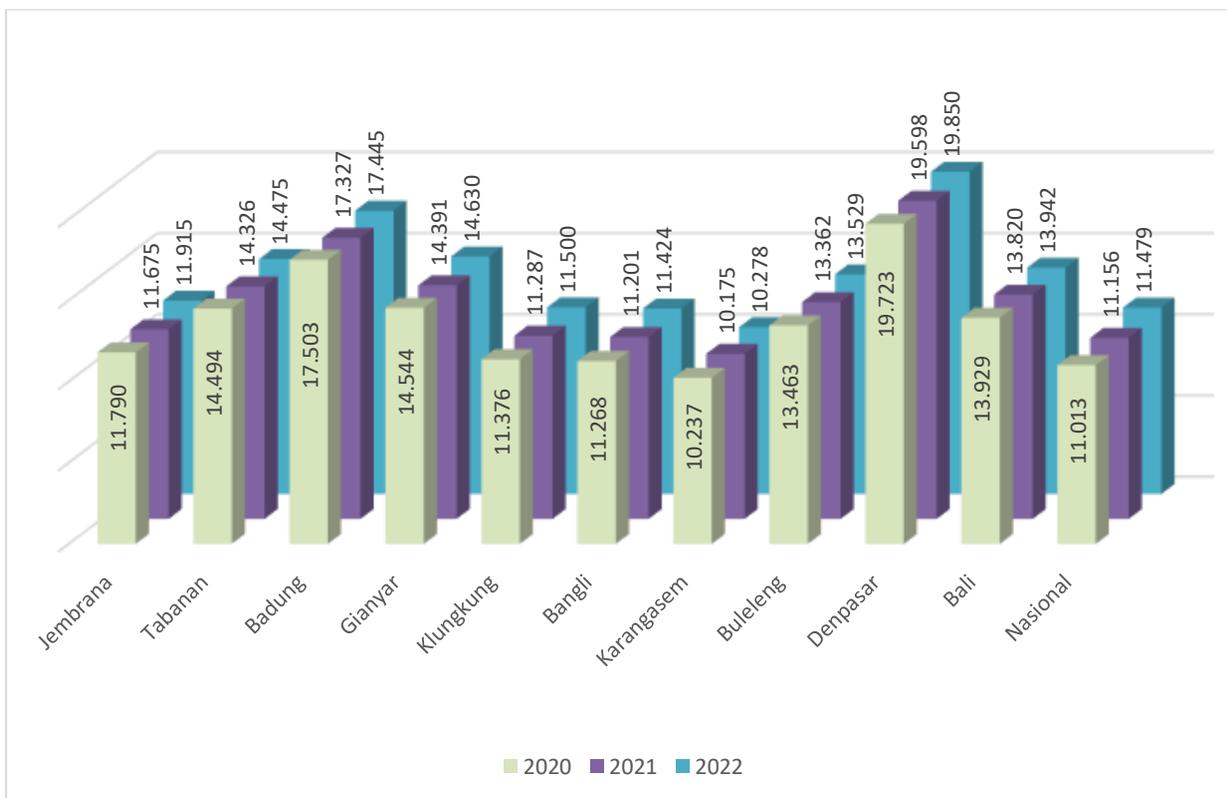
Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2018-2022



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 11.500.000 per orang per tahun. Angka tersebut berada di atas angka pengeluaran per kapita penduduk secara nasional yang sebesar Rp. 11.479.000 per orang per tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Provinsi Bali yang sebesar Rp. 13.942.000 per orang per tahun. Jika diamati, pada tahun 2022, secara nasional, regional bali dan lokal Kabupaten Klungkung pengeluaran per kapita penduduk mengalami kenaikan. Hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian yang mulai membaik pasca pandemi.

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar berikut meyajikan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2020-2022



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar 3.11 Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2020-2021



Capaian kinerja pengeluaran per kapita per tahun per orang Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pengeluaran per kapita tertinggi ada di Kota Denpasar dan terendah ada di Kabupaten Karangasem. Pengeluaran Per Kapita sedikit banyak dipengaruhi oleh pekerjaan penduduk di Kabupaten Klungkung. Jenis pekerjaan menentukan besaran penghasilan penduduk, dan besaran penghasilan mempengaruhi pengeluaran per kapita. Semakin tinggi penghasilan penduduk, jumlah yang dikeluarkan untuk kehidupan menjadi lebih tinggi. Sebagai gambaran, berikut disajikan data penduduk Kabupaten Klungkung berdasarkan pekerjaan pada tahun 2022.

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022

No.	Pekerjaan	Jiwa	Persen (%)
1.	Belum/Tidak Bekerja	63.344	28,91
2.	Pelajar/Mahasiswa	27.039	12,34
3.	Pertanian/Peternakan/Perikanan	33.242	15,17
4.	Perdagangan	9.026	4,12
5.	Industri	327	0,15
6.	Perangkat Desa	426	0,19
7.	Konstruksi	269	0,12
8.	PNS/TNI/POLRI	5.490	2,51
9.	Swasta/BUMN/BUMD	33.600	15,33
10.	Wiraswasta	15.965	7,29
11.	Dosen/Guru	1.471	0,67
12.	Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	577	0,26
13.	Lainnya	28.336	12,93
	Total	219.112	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 9 Pebruari 2023

Mata pencaharian masyarakat Klungkung didominasi pegawai swasta/BUMN/BUMD sebesar 33.600 jiwa atau sebesar 15,33% dan pekerja pertanian/peternakan/perikanan sebesar 33.242 jiwa atau sebesar 15,17%. Kondisi penduduk yang belum/ tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 61.184 jiwa atau sebesar 28,23%.



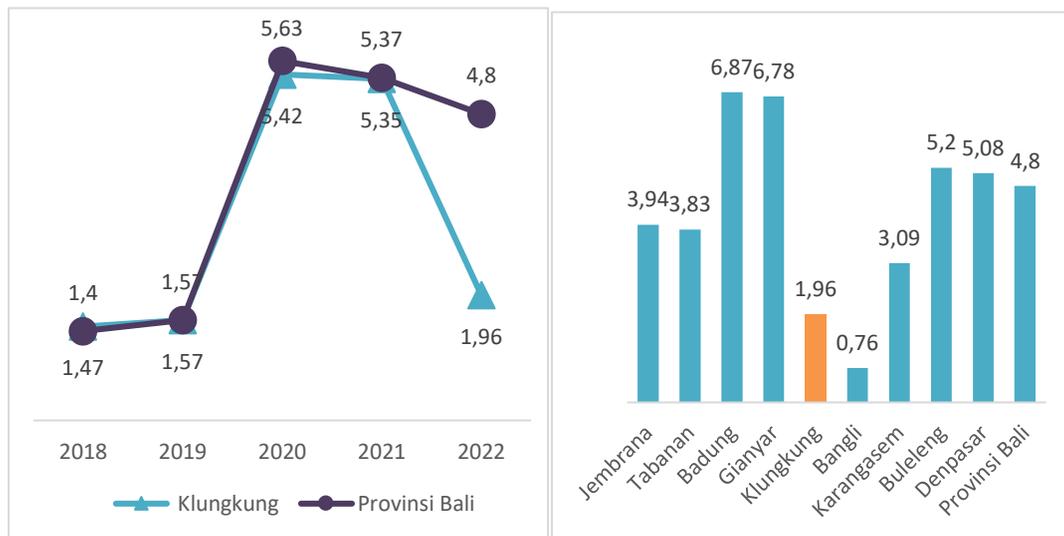
Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : Paparan RPD oleh Baperlitbang Klungkung, 31 Januari 2023

Gambar Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 pada angka 1,96 persen, dimana jumlah pengangguran terbuka sebanyak 2.262 jiwa sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 112.973 jiwa.



Sumber : BPS Prov. Bali, 1 Desember 2022

Gambar Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 dan perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022



Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, TPT Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemic. Dibandingkan Provinsi Bali, penurunan TPT Kabupaten Klungkung jauh lebih baik pada angka 1,96% dibandingkan dengan Provinsi Bali pada angka 4,8%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berada di peringkat 2 terendah. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Denpasar yang mencapai 6,87% dan yang terendah di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,76%.

Pada tahun 2022, daya beli masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan daya beli salah satunya dilakukan melalui penurunan pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan beberapa strategi yang ditujukan pada tenaga kerja Kabupaten Klungkung, diantaranya:

1. Pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan pelatihan teknis kewirausahaan bagi wirausaha. Pada tahun 2022 ada 20 Calon Pekerja Migran Indonesia yang dilatih dan 20 orang mendapat pelatihan spa. 1
2. Fasilitasi penyaluran tenaga kerja ke luar negeri bagi penduduk tidak mampu.
3. Penyaluran Bantuan bahan dan alat kepada 10 kelompok pelaku wirausaha.
4. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada tenaga kerja yang terdampak covid-19. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus yang membantu tenaga kerja.
5. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada pelaku wirausaha.
6. Pembinaan terhadap wirausaha yang telah ada.

Dalam meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan sebagai berikut:

1. Sebagian kecil tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka usaha kecil untuk membantu peningkatan pendapatan. Hal tersebut membantu penggerak perekonomian sekitarnya.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah membantu adanya peluang pekerjaan seperti padat karya dan pelaksanaan paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah.



Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam usaha-usaha meningkatkan daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung. Meningkatnya pengangguran di Kabupaten Klungkung salah satunya disebabkan oleh bencana pandemi covid-19 yang memaksa sektor-sektor perekonomian terpaksa ditutup, tak terkecuali sektor pariwisata. Kabupaten Klungkung termasuk salah satu wilayah yang menggantungkan perekonomian pada sektor pariwisata. Selain ditutupnya sektor pariwisata di dalam daerah Bali, pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada sektor pariwisata diluar negeri juga menambah peningkatan pengangguran.
2. Meningkatnya jumlah usaha kecil yang terdampak covid-19  
Selain pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, pengangguran akibat usaha yang ditutup juga memunculkan pengangguran dari pemilik usaha tersebut. Pemilik usaha menjadi tidak memiliki pekerjaan, dan untuk memulai usaha baru memerlukan permodalan dan situasi yang kondusif.
3. Refocusing anggaran juga mengakibatkan ditundanya program fasilitasi pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, program peningkatan kompetensi teknis berupa pelatihan-pelatihan serta sertifikasi tenaga kerja serta pelatihan wirausaha baru menjadi terhambat.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebagai berikut:



Tingkat Efisiensi  
Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,80	100	0,72	72,55	87,19	0,83	0,16	Efisien
<b>Rata-Rata</b>	<b>71,80</b>	<b>100</b>	<b>0,72</b>	<b>72,55</b>	<b>87,19</b>	<b>0,83</b>	<b>0,16</b>	<b>Efisien</b>

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing adalah sebesar 0,16 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  
Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.188.535.442	13.482.073.525	17.706.461.917	43,23
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.948.209.878	8.449.787.532	11.498.422.346	42,36
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.746.631.872	6.435.643.825	3.310.988.047	66,03
Penetapan Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar	1.811.250	1.811.250	-	100,00
Penetapan Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.699.000	3.699.000	-	100,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.690.277.584	3.689.472.571	805.013	99,98
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.339.900	7.746.900	2.593.000	74,92
Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	97.745.312	52.360.611	45.384.701	53,57



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Peningkatan Pelayanan BLUD	192.521.244.671	188.070.400.734	4.450.843.937	97,69
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.022.236.830	45.210.496.217	5.811.740.613	88,61
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.897.950	1.552.200	345.750	81,78
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.001.800	125.959.800	42.000	99,97
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.365.562.309	55.482.699.623	4.882.862.686	91,91
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.473.553.974	1.243.068.545	230.485.429	84,36
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.098.727.775	1.002.833.861	95.893.914	91,27
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.554.500	5.854.500	700.000	89,32
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	7.388.800	6.739.250	649.550	91,21
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.335.402.000	5.326.587.750	8.814.250	99,83
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	266.374.942	151.012.281	115.362.661	56,69
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	862.944.500	782.320.918	80.623.582	90,66
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	245.230.500	71.128.350	174.102.150	29,00
<b>Jumlah</b>	<b>378.020.370.789</b>	<b>329.603.249.243</b>	<b>48.417.121.546</b>	<b>87,19</b>

Sumber : [fmis.klungkungkab.id](http://fmis.klungkungkab.id), 7 Februari 2023.

Pada tahun 2022, Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan 21 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran Perubahan sebesar Rp. 378.020.370.789 dan terealisasi sebesar Rp. 329.603.249.243 dan sisa anggaran sebesar Rp. 48.417.121.546 atau terealisasi sebesar 87,19 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan



Kabupaten Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pelayanan pendidikan non formal dan informal. Selain Dinas Pendidikan, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung juga mendukung pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan pekan olahraga dan seni pelajar tingkat kecamatan, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, serta penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga jugamendukung dalam pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar tingkat Kabupaten serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memegang peranan dalam memberikan pelayanan perpustakaan daerah, desa dan kecamatan maupun perpustakaan keliling untuk mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perindustrian di Kabupaten Klungkung.

### **Sasaran 3**

#### **Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% Menjadi 3%**

Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang kompleks. Tiap rezim pemerintah dihadapkan pada pekerjaan menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Isu ketimpangan ekonomi sudah ramai dibicarakan di Indonesia sejak 1970-an. Ramai muncul kajian dan pemikiran mencari ramuan agar pertumbuhan ekonomi juga bisa menciptakan pemerataan, yang akhirnya mengurangi ketimpangan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.



Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.

Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan).

Berangkat dari pentingnya mendukung program nasional dalam menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian target indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% tahun 2021 disajikan pada grafik sebagai berikut:

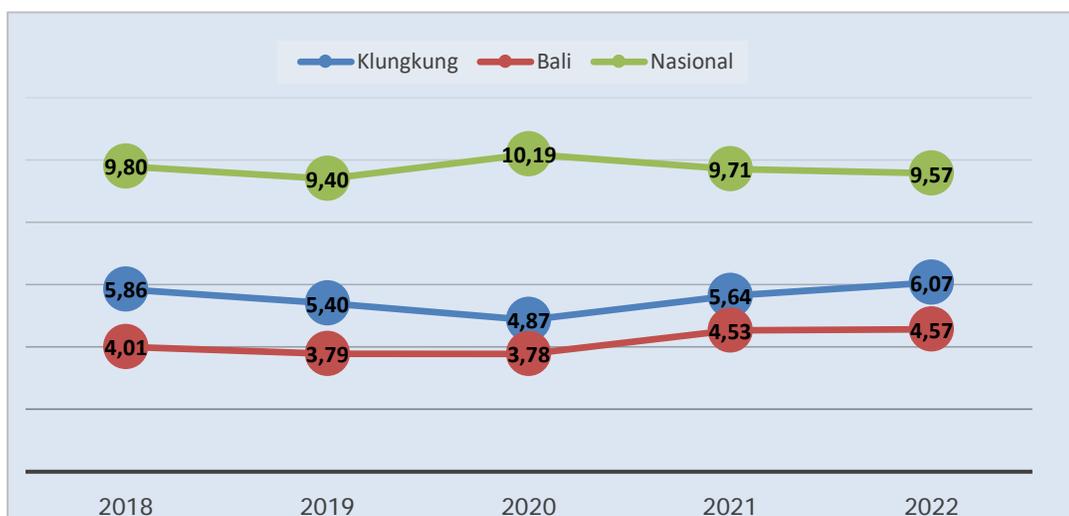


Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Persentase Penduduk Miskin (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Persentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 4,8persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung justru meningkat menjadi 6,07 persen dibandingkan tahun 2021 pada angka 5,64 persen. Untuk melihat capaian kinerja penurunan kemiskinan ini perlu dilihat trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Gambar berikut menyajikan trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional.



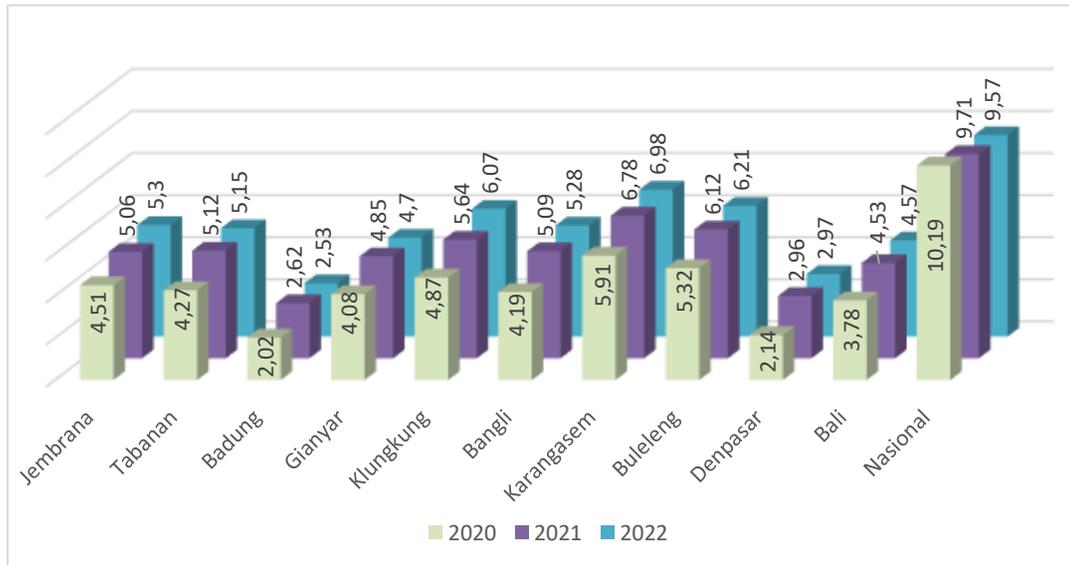
Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2018-2022

Jika dilihat dari trend, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Pada periode 2018-2022 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung mencapai titik terendah pada tahun 2020 dan meningkat pada 2 tahun terakhir. Pola yang sama juga terjadi di Provinsi Bali, berbanding terbalik dengan nasional yang justru menunjukkan tren menurun pada tahun 2021 dan 2022. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,57 persen di tahun 2022.



Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

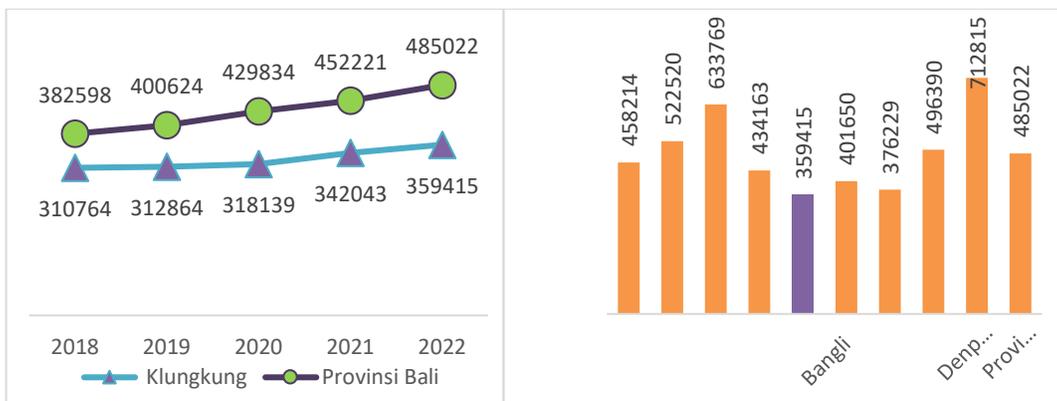


Sumber : [bps.baliprov.go.id](https://bps.baliprov.go.id), 1 Desember 2022

Gambar Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (%),2020-2022

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung berada di posisi ke 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan nilai 6,07 persen. Persentase penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Karangasem dengan 6,98 persen dan terendah ada di Kabupaten Badung dengan 2,53 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali pada angka 4,57 persen, persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung masih lebih tinggi.

Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Adapun perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

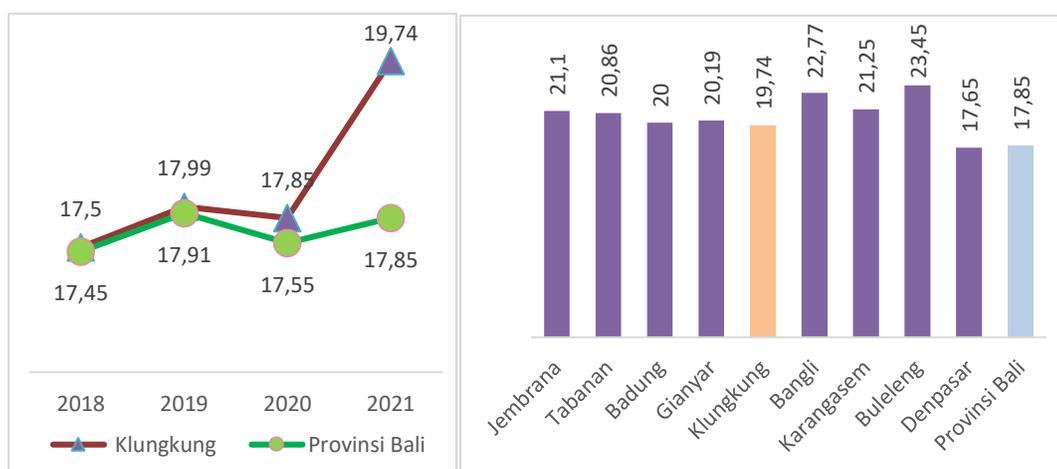


Sumber : bps.baliprov.go.id, 2 Desember 2022

Gambar Perkembangan Garis Kemiskinan (ribu rupiah) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022 dan Perbandingannya dengan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung paling rendah diantara Kabupaten/kota di Bali. Hal ini menunjukkan biaya hidup di Klungkung masih lebih murah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, karena terjaganya inflasi. Pada tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Klungkung bernilai Rp 359.415 ribu, meningkat dari Rp 342.043 ribu di tahun 2021 namun masih merupakan yang terendah di Bali.

Distribusi pendapatan digunakan untuk melihat bagaimana sebaran penduduk yang menikmati pendapatan di suatu daerah. Distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar dibawah ini.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 14 Maret 2022

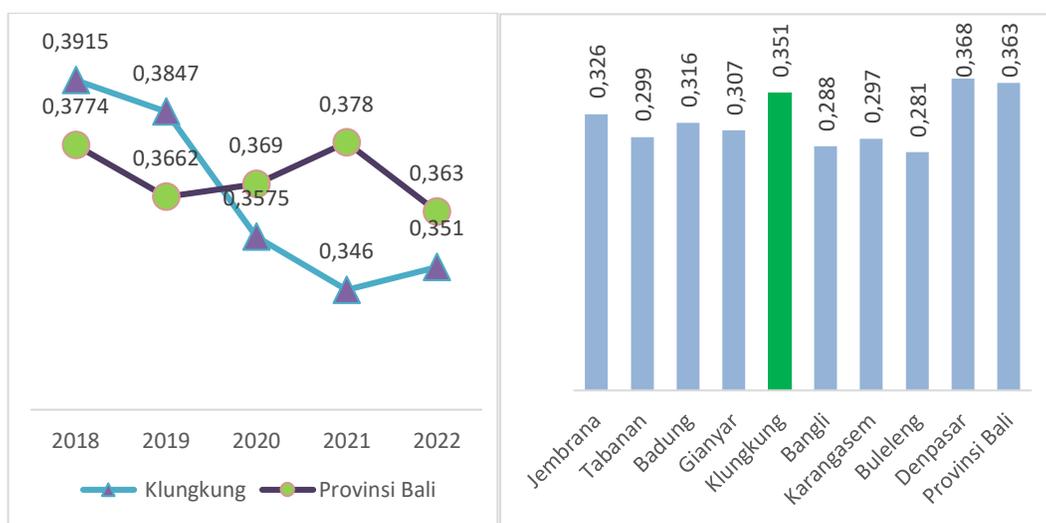
Gambar Perbandingan Distribusi Pendapatan 40% penduduk pendapatan terendah Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2018-2021 dan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2021



Distribusi pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Klungkung berfluktuasi dan meningkat pada tahun 2022. Pada tahun 2022, distribusi pendapatannya mencapai 19,74 persen dan berada diatas nilai Provinsi Bali sebesar 17,85. Dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Bali, maka distribusi pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan terendah Kabupaten Klungkung berada di peringkat 8 dari 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Distribusi yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Buleleng yang mencapai 23,45%.

Gini Ratio juga merupakan salah satu alat untuk melihat sebaran kemiskinan di suatu wilayah. Seberapa besar ketidakmerataan pembagian pendapatan di suatu wilayah. Semakin besar semakin buruk ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah. Gini ratio Kabupaten Klungkung dalam kurun lima tahun terakhir berfluktuasi. Sejak tahun 2020, Gini ratio Kabupaten Klungkung kembali berada di bawah gini ratio Provinsi Bali. Pada tahun 2022, gini rasio Kabupaten Klungkung berada pada angka 0,351 poin, meningkat dari tahun 2021 namun tetap di bawah gini rasio Provinsi Bali yang mencatatkan 0,363 poin. Meskipun demikian, Kabupaten Klungkung mencatatkan ketimpangan tertinggi kedua setelah Kota Denpasar diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.

Adapun perkembangan gini ratio Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Pebruari 2023

Gambar Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 dan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2022



Dalam usaha mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Pandemi Covid 19 yang berkepanjangan telah meningkatkan pengangguran terbuka sehingga mengakibatkan munculnya klaster-klaster kemiskinan baru.
2. Belum efektifnya pemberian bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat ketimpangan, disebabkan oleh beberapa penyimpangan yang ditemui dalam penyalurannya.
3. Inflasi harga bahan pangan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat yang rentan yang berada di perbatasan garis kemiskinan, menjadi miskin tatkala terdapat kenaikan harga bahan pangan pokok.
4. Lemahnya pendataan terkait kemiskinan berupa :
  - a. Data *by name by address* penduduk miskin yang sering tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak dapat sampai kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan.
  - b. Profil kemiskinan *by name by address* yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan penyebab kemiskinannya.

Untuk mencapai penurunan Persentase Penduduk Miskin sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan kemiskinan adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut:

#### 1. Monitoring Kondisi Kemiskinan

Secara berkala dilakukan kegiatan Bedah Desa yang merupakan kegiatan untuk monitoring pelaksanaan pembangunan di Desa sekaligus memastikan penanganan atas kemiskinan yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi.

2. Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (Gema Taskin) melalui pemberian bantuan bedah rumah, Bantuan Pangan Non Tunai (RASTRA), Program Keluarga Harapan (PKH) dan capaian sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### a. Bedah Rumah dan Rehab Rumah

Bantuan bedah rumah sebagaimana disajikan dalam tabel.



Program Bantuan Bedah Rumah dan Rehab Rumah di Kabupaten Klungkung  
Tahun 2013-2022

NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDAH RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA	KETERANGAN BANTUAN CSR		
1	2013	123	-	2	-	125	Bedah Rumah
2	2014	110	10	248	BPD 10	368	Bedah Rumah
3	2015	110	23	173	Yayasan Indah Berbagi(2), Pos Bali(3), Gerakan Koperasi(1), dan Bansos Bupati(2), BPD 15	306	Bedah Rumah
4	2016	89	15	175	BPD 15	279	Bedah Rumah
5	2017		10	198	BPD 8, Gangga 2	208	Bedah Rumah
				<b>373</b>		<b>373</b>	<b>Rehab Rumah</b>
6	2018	37	15	<b>80</b>	<b>15 BPD</b>	132	<b>Bedah Rumah</b>
						<b>47</b>	<b>Rehab Rumah</b>
7	2019	<b>243 (BKK Badung)</b>	-	<b>109</b>			<b>Bedah Rumah</b>
				<b>219</b>			<b>Rehab Rumah</b>
8	2020	-	-	-	-	-	Tidak Ada karena refocusing anggaran
9	2021	-	2	109	Dana Operasional Bupati	111	Bedah Rumah
		-	2	189	Dana Operasional Bupati	191	Rehab Rumah
10	2022			70		<b>70</b>	
			<b>210</b>	58	<b>Kemensos</b>	<b>268</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>712</b>	<b>287</b>	<b>2.003</b>		<b>2.478</b>	

Sumber :Dinas Sosial PPPA, 2023

- b. Bantuan Sembako kepada Penyandang Disabilitas, untuk tahun 2022 sebanyak 50 paket dan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 582 paket.
- c. Bantuan Kursi Roda, untuk tahun 2022 sebanyak 17 buah dan sampai tahun 2022 sebanyak 134 buah
- d. Bantuan Alat Bantu Dengar, untuk tahun 2021 sebanyak 8 buah dan sampai tahun 2021 sebanyak 40 buah.
- e. Bantuan Sembako kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), untuk tahun 2021 sebanyak 40 paket dan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 273 paket.



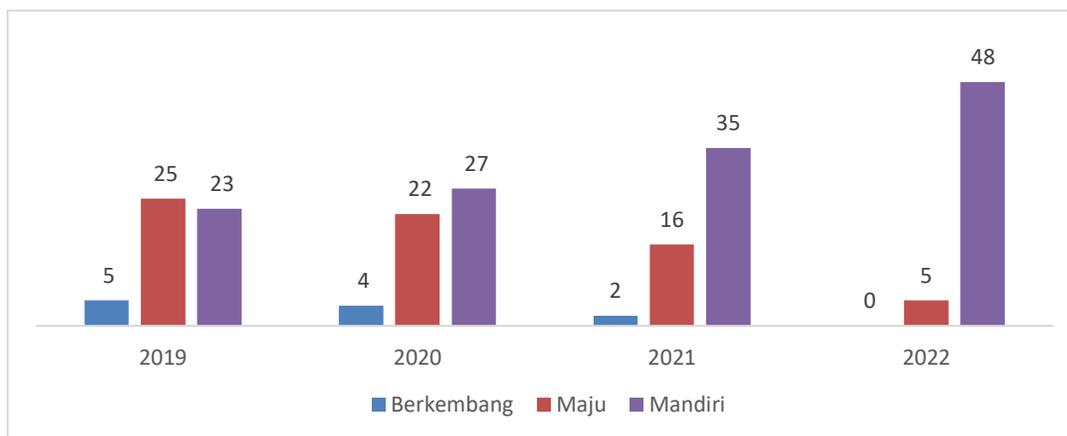
- f. Bantuan Tongkat ketiak, untuk tahun 2022 sebanyak 2 buah dan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 33 buah.
  - g. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) = 8.560 KPM (Tahun 2020 sebanyak 7.579 KPM)
  - h. Program Keluarga Harapan PKH = 5.972 KK (Tahun 2020 sebanyak 3.780 KK)
3. Mendorong Tercapainya Penduduk Yang Tumbuh Seimbang.  
Penduduk yang tumbuh seimbang merupakan salah satu faktor penentu masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk yang semakin banyak akan menyebabkan berbagai permasalahan lain karena tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendorong tercapainya penduduk yang tumbuh seimbang ini dilakukan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan KB sehingga masyarakat sangat menyadari pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Selain hal tersebut juga dilakukan konseling dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka menurunkan angka perkawinan dibawah umur.
  4. Menurunkan Angka Pengangguran  
Pengangguran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kemiskinan, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pemberian pelatihan keterampilan kerja terhadap tenaga kerja agar mampu bersaing dalam persaingan pasar tenaga kerja serta mengadakan kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha agar tenaga kerja di Kabupaten Klungkung dapat langsung tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, upaya pengurangan angka pengangguran juga dilakukan dengan menggalakkan program transmigrasi ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya.
  5. Peningkatan Peran Serta Perempuan.  
Perempuan seringkali menjadi objek tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya peningkatan peran serta perempuan dengan memberikan pelatihan wirausaha terhadap perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat memiliki keterampilan kerja dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan guna turut membantu menopang kehidupan keluarga. Untuk menguatkan peran dan meningkatkan kualitas pengelolaan teknis perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Klungkung



membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan terbentuknya unit khusus yang berfokus pada penanganan perlindungan perempuan dan anak, permasalahan-permasalahan di bidang perempuan dan anak dapat diselesaikan dan meningkatkan kualitas perempuan dan anak di Pemerintah Kabupaten Klungkung.

6. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.

Peningkatan kemandirian masyarakat desa dilakukan dengan terus aktif mendorong pemerintahan desa dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa masing-masing sesuai dengan karakteristik desanya, sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian desa. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Status Desa di Kabupaten Klungkung yang di dominasi Desa Maju dan Desa Mandiri. Gambar dibawah menyajikan status Desa di Kabupaten Klungkung berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 yang dirilis Kementerian Desa sebagai berikut:



Sumber : Indeks Desa Membangun, Website Kementerian Desa, 2023

Gambar Status Desa di Kabupaten Klungkung (desa), 2019-2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari 53 desa yang ada di Kabupaten Klungkung, tidak ada lagi desa yang menyandang status Desa Berkembang pada tahun 2022. Status desa tahun 2022 terdiri dari 5 desa berstatus maju yaitu Batukandik, Kutampi, Pejukutan, Sekartaji, dan Tanglad, sedangkan 48 desa lainnya sudah berstatus mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial,



ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi  
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%  
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,80	100	20,83	6,07	87,39	14,40	-0,31	Tidak Efisien
<b>Rata-Rata</b>	<b>4,80</b>	<b>100</b>	<b>20,83</b>	<b>6,07</b>	<b>87,39</b>	<b>14,40</b>	<b>-0,31</b>	<b>Tidak Efisien</b>

Sumber : data diolah



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% adalah sebesar -0,31 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran  
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%  
Tahun 2022**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.961.250	13.529.550	1.431.700	90,43
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.355.100	24.318.064	6.037.036	80,11
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.243.900	22.100.468	10.143.432	68,54
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	14.316.400	12.928.400	1.388.000	90,30
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.321.100	41.714.100	6.607.000	86,33
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.202.800	26.438.800	2.764.000	90,54
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	25.110.400	14.099.400	11.011.000	56,15
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.420.000	64.429.000	6.991.000	90,21
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	338.851.184	268.743.714	70.107.470	79,31
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	283.000.000	279.680.000	3.320.000	98,83
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	995.413.000	467.911.363	527.501.637	47,01
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86.250.000	74.130.000	12.120.000	85,95
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.348.957.240	1.021.698.582	327.258.658	75,74
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.770.058.026	3.674.419.726	95.638.300	97,46
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	359.689.500	313.880.810	45.808.690	87,26



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	270.410.226	147.898.004	122.512.222	54,69
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	344.396.777	319.100.184	25.296.593	92,65
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.336.200	145.948.335	38.387.865	79,18
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.641.167.374	2.582.907.392	58.259.982	97,79
<b>Jumlah</b>	<b>10.888.460.477</b>	<b>9.515.875.892</b>	<b>1.372.584.585</b>	<b>87,39</b>

Sumber : *fmis.klungkungkab.id*, 7 Pebruari 2023

Pada tahun 2022, Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan 19 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 10.888.460.477 dan terealisasi sebesar Rp. 9.515.875.892 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.372.584.585 atau terealisasi sebesar 87,39 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Bupati Klungkung menyerahkan bantuan kursi roda



Bupati Klungkung menyerahkan bantuan kepada warga terdampak covid-19



Penyerahan BLT pada warga terdampak covid-19



Pemantauan Pelaksanaan Bedah Rumah